



Political Discourse of Natural Resources and Actor Relations in Environmental Contestation in Mahakam Ulu

Yuliana Lerip, Jauchar B

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman
Samarinda, Indonesia

Email correspondence: yulianalerip77@gmail.com

Abstract

Purpose – This study examines the political discourse of natural resource governance and power relations among actors in environmental management in Mahakam Ulu Regency, East Kalimantan.

Methodology – The research employs a qualitative method through literature review and Critical Discourse Analysis (CDA). Data sources include policy documents, civil society reports, academic publications, and relevant media coverage.

Findings – The discourse of “development” is used by the state, local elites, and corporations to legitimize extractive expansion such as mining and plantations. This has reduced Indigenous living spaces, reinforced power inequality, and weakened community participation. Alternative discourses on customary land rights have emerged but remain structurally limited.

Practical Implications – The study highlights the need for fair and participatory natural resource governance, stronger recognition of Indigenous rights, and sustainable environmental policies.

Originality/Value – This research is novel in focusing on Mahakam Ulu as an underexplored borderland region and combining CDA with actor-relational analysis.

Keywords – Environmental Politics; Natural Resource Discourse; Actor Relations; Indigenous Communities; Mahakam Ulu

Diskursus Politik Sumber Daya Alam dan Relasi Aktor dalam Kontestasi Lingkungan di Mahakam Ulu

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini mengkaji diskursus politik tata kelola sumber daya alam dan relasi kekuasaan antaraktor dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

Metodologi – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA). Sumber data meliputi dokumen kebijakan, laporan organisasi masyarakat sipil, publikasi akademik, dan pemberitaan media yang relevan.

Temuan – Wacana “pembangunan” digunakan oleh negara, elit lokal, dan korporasi untuk melegitimasi ekspansi ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan. Hal ini menyebabkan penyempitan ruang hidup masyarakat adat, memperkuat ketimpangan kekuasaan, dan melemahkan partisipasi masyarakat. Wacana alternatif mengenai hak atas tanah adat mulai muncul, namun masih terbatas secara struktural.

Implikasi Praktis – Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang adil dan partisipatif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Orisinalitas/Nilai – Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Mahakam Ulu sebagai wilayah perbatasan yang masih minim dikaji serta penggabungan CDA dengan analisis relasi aktor.

Kata Kunci – Politik Lingkungan; Diskursus Sumber Daya Alam; Relasi Aktor; Masyarakat Adat; Mahakam Ulu

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menjadi isu urgensi yang dianggap kompleks karena melibatkan elemen penting seperti kepentingan aktor politik, pengusaha dan pemerintah. Ketiga elemen ini sering kali menjadi penekan adanya pembangunan ekonomi yang masif dalam mengeksploitasi SDA (Rifai, 2024; Hidayat, 2025). Tetapi dampaknya terhadap komunitas lokal, terutama masyarakat adat, menyebabkan terbatasnya ruang hidup, degradasi yang berasal dari lingkungan, kemudian marginalisasi serta perampasan lahan tanpa kesepakatan terlebih dahulu (Kennedy et al., 2023; Jenkins et al., 2016). Ketegangan ini menimbulkan adanya formalitas tata kelola SDA yang tidak menjadi persoalan, tetapi menjadi arena isu perlombaan politik yang hanya didasari wacana dan kekuasaan (Aysan et al., 2023 ; Sabogal, 2009).

Mahakam Ulu, sebagai kabupaten yang berasal dari hasil pemekaran dari Kutai Barat pada tahun 2013, mengalami tantangan, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan yang sesuai dengan kapasitas ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan (Rusdiana, 2017). Di sisi lain, adanya tekanan yang berasal dari peningkatan jumlah pendapatan daerah yang mendorong pemerintah lokal untuk membuka ruang investasi seluas-, terutama pada sektor pertambangan dan perkebunan yang memicu penyempitan ruang hidup komunitas adat, rusaknya ekosistem lokal serta konflik agraria antara pihak perusahaan dengan masyarakat luasnya (Berenschot & Dhiaulhaq, 2023 ; Franks et al., 2014 ; Sadzali, 2025). Situasi ini merupakan wacana “Pembangunan” yang sering disalahartikan sebagai legitimasi utama untuk mendorong adanya proyek-proyek eksploitasi sumber daya, meskipun sering kali bertentangan dengan keinginan masyarakat Mahakam Ulu dengan prinsip keberlanjutan lingkungan (Dunlap et al., 2024; Raftopoulos & Morley, 2025; David, 2024).

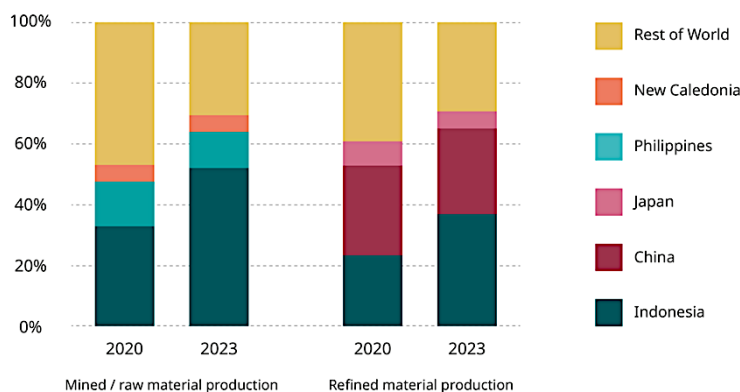
Dalam 5 tahun terakhir, berbagai kajian studi telah menyoroti pentingnya analisis diskursus serta hubungan antaraktor dalam tata kelola SDA. Seperti penelitian yang pernah dilakukan yang menyoroti adanya narasi pembangunan hijau yang digunakan untuk konsesi industri sawit di area Kalimantan, tanpa melibatkan

masyarakat lokal secara bermakna (Macdonald et al., 2024 ; Gatto & Sadik-Zada, 2024 ; Hafsari, 2024). Studi lainnya desentralisasi seringkali yang sering kali dimanfaatkan dan di gunakan sebagai alat persekongkolan para aktor lokal untuk mengeksplotasi sumber daya alam terutama dalam perizinan tambang (Hadjon, 2020 ; Ambarita, 2024)

Konflik yang terjadi, seperti pemenuhan hak atas tanah adat, menjadi sorotan dalam memperlihatkan adanya wacana legal-formal negara yang didominasi oleh beberapa kepentingan hingga meminggirkan posisi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan (Davidson & Henley, 2010 ; Enala et al., 2025). Disisi lain, menemukan adanya proses perencanaan tata ruang yang awalnya hanya terkesan partisipatif, kemudian tetap di ambil oleh aktor yang mendominasi dalam pengendali kepentingan investasi Untuk memperkuat agrumentasai tersebut dengan memperlihatkan adanya narasi keberlanjutan yang kerap kali menjadi alat untuk memanipulasi sebuah kebijakan yang di lakukan oleh negara dan korporasi dalam bentuk narasi penyampaian opini publik (Utoyo, 2017 ; Wibisana, 2025)

Namun, yang terjadi demikian karena masih sedikit kajian yang secara khusus melibatkan Kabupaten Mahakam Ulu jika berbicara tentang diskursus politik yang menghadapi tantangan ganda berupa kebutuhan ekonomi dan pelestarian ekologis yang mendesak (Meyfroidt et al., 2020 ; Liu et al., 2023). Di dukung dengan gambar di bawah ini posisi negara Indonesia berada peringkat terakhir di urutan :

Gambar 1. Produksi Nikel Global (*Mined / Raw Material dan Refined Material*)



Sumber: IEA, Global Critical Minerals Outlook, 2024

Gambar 1 menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi sumber daya alam yang miliki serta nilai tambah yang mampu di hasilkan oleh sebuah negara terutama dalam aspek hilirisasi serta pengelolaan berkelanjutan (Ramadhan et al., 2024). Dinamika yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Indonesia secara umum seperti studi yang di lakukan oleh menganalisis adanya distribusi pendapatan bagi wilayah sebagai penghasil sawit yang menimbulkan dampak terhadap aktivitas lingkungan serta tata kelola keuangan daerah yang meliputi inklusivitas masyarakat lokal serta retribusi industri (Nurfatriani et al., 2022 ; Purnomo et al., 2020)

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah yang masih jarang dikaji dalam diskursus politik sumber daya alam. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak membahas konflik agraria dan ekspansi tambang di Kalimantan secara umum, kajian ini menyoroti bagaimana narasi pembangunan dan pelestarian lingkungan dibentuk oleh aktor negara, elit lokal, dan korporasi (Acciaioli, 2023 ; Owen et al., 2023). Pendekatan ini memberi kontribusi baru terhadap literatur pengelolaan lingkungan, khususnya di wilayah perbatasan yang kaya ekologi namun menghadapi tekanan Pembangunan (Eilenberg, 2014)

Di hubungkan dengan *Cacao Agroforestry* in Mahakam Ulu, adanya transformasi yang menghasilkan praktik agroforestry kakao tradisional yang *menghasilkan Good Agricultural Practices* yang menghubungkan dengan praktik agroforestry modern, yang menyoroti adanya peran kepemilikan lahan, institusi lokal dan kolaborasi multiaktor (Wiati et al., 2025 ; Rodríguez et al., 2023). Meskipun, adanya kontribusi terhadap pemahaman secara praktek keberlanjutan di Mahakam Ulu, memunculkan narasi Pembangunan serta pelestarian lingkungan yang di bentuk oleh relasi negara, korporasi serta elit lokal . Di hubungkan dengan kajian konflik agrarian di Kalimantan Timur yang di lakukan oleh (Prasetya & Zuffran, 2023). Adanya memicu konflik adanya lahan yang dipicu dengan ketidakjelasan yang mempengaruhi adanya batas hak ulayat, minimnya partisipasi warga yang memiliki perizinan, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah yang cenderung pada eksploitasi SDA (van der Muur, 2018). Penelitian serupa yang di sampaikan yang memerlukan adanya reformasi hukun agrarian yang penguatan secara perlindungan hak masuarakat adat

yang seharusnya terpenuhi, yaitu memetakan adanya bagian-bagian konflik Perkebunan sawit yang berada di Kotawaringin Timur dengan adanya dampak adanya alih fungsi lahan serta adanya marginalisasi masyarakat lokal (Sanjaya et al., 2022 ; Djumaty & Dey, 2023).

Di bagian kebijakan menurut (Setiady et al., 2024), yang menganalisis tata kelola sawit serta menemukan bahwa sertifikasi ISPO serta adanya regulasi keberlanjutan yang masih lemah akibat lemahnya pengawasan serta adanya konflik kepentingan. yang menunjukkan adanya sebuah kebijakan pemerintah di picu untuk menekan adanya deforestasi cenderung berat di picu dengan adanya kepentingan ekonomi di bandingkan eksistensi kelestarian lingkungan kemudian relevan dengan mengatakan bahawa kawasan hutan adat sering kali luput dalam penanganan solusi perubahan iklim yang masih lemah di sertai dengan lambannya penangan institusi lokal dalam memecahkan konflik lahan adat (Mahendra & Maria, 2023 ; Abdullah et al., 2024). menyoroti distribusi adanya pendapatan sawit yang secara inklusif di samping mengatakan adanya kesenjangan antara kebijakan green economy serta pelaksanaan peraturan daerah ((Nurfatriani et al., 2022 ; Putriyanda et al., 2025).

Kumpulan penelitian di atas menunjukkan bahwa wacana pembangunan keberlanjutan kerap digunakan untuk melegitimasi adanya kebijakan eksploitasi SDA, dan belum banyak kajian yang menyinggung secara spesifik produksi serta negosiasi di Mahakam Ulu. Hal ini memicu adanya celah penelitian (*research gap*) yang diisi oleh penelitian ini, yaitu menelaah adanya relasi kekuasaan serta pembentukan wacana pembangunan dalam konteks wilayah perbatasan yang menghadapi tekanan investasi serta mengelola pelestarian ekologi secara berkelanjutan. Ketimpangan distribusi penghasilan yang berasal dari hilirisasi SDA untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lokal di Sulawesi memiliki keterkaitan dengan fenomena di Kalimantan (Wiati et al., 2025).

Adapun wilayah yang masih didominasi oleh hutan adat menjadi kajian penting dalam riset ini. Mahakam Ulu didominasi oleh masyarakat adat Dayak yang mengalami tantangan dari investor dari luar. Selama ini, banyak studi yang hanya lebih fokus pada konflik agraria, sawit serta tambang di area Kalimantan Timur tanpa

mempertimbangkan narasi pembangunan, konservasi serta kesejahteraan masyarakat sebagai research gap. Jika di tinjau lebih lanjut keterbaharuan penelitian ini terletak pada analisis suatu daerah , korporasi serta elit lokal dalam melindungi lingkungan keberlanjutan. Urgensi dari penelitian ini ialah Mahakam Ulu menjadi titik rawan dalam eksploitasi ekonomi dan lingkungan sehingga yang dibutuhkan ialah tata kelola yang adil hingga menimalisise resiko kerusakan hutan, konflik sosial hingga tidak menghilangkan identitas masyarakat adat .,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review sebagai teknik utama dan analisis data, yang dilaksanakan selama 1 bulan pada Juli 2025, karena penelitian ini menggunakan data primer serta seluruh temuan dibangun dari penelusuran dokumen resmi serta sumber-sumber sekunder yang relevan dengan tata kelola sumber daya alam Mahakam Ulu (Creswell, 2018).

Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mulai dari laporan perencanaan Bappeda, pernyataan Bupati dan Wakil Bupati, hingga publikasi Dinas Lingkungan Hidup menjadi sumber utama untuk membaca bagaimana pemerintah daerah membingkai isu pengelolaan lingkungan. Sumber-sumber ini kemudian diperkaya dengan laporan lembaga masyarakat sipil seperti Walhi Kaltim dan Auriga Nusantara, artikel akademik dari para peneliti universitas, serta pemberitaan media yang memuat pernyataan pejabat publik, anggota DPRD, dan tokoh adat sebagai aktor yang ikut membentuk wacana kebijakan.

Melalui kerangka CDA Fairclough (Fairclough, 1995), analisis dilakukan pada tiga level teks, praktik wacana, dan praktik sosial untuk menelusuri bagaimana narasi tentang sumber daya alam dikonstruksi, diproduksi ulang, dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor dominan (Munfarida, 2014) . Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengungkap relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi di balik kebijakan lingkungan, sekaligus memahami struktur sosial-politik yang menjadi latar pembentuk wacana pengelolaan SDA di Mahakam Ulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan bahwa jika kebijakan pembangunan tidak netral, maka berpotensi menghadirkan narasi politik yang menguntungkan elit tertentu. Sebagai area dengan otonomi baru, Mahakam Ulu sering dinarasikan sebagai wilayah yang “Tertinggal”, “Terisolasi”, sehingga perlu dipercepat pembangunannya. Dalam perspektif diskursus politik oleh Fischer, narasi ini penting untuk dianalisis lebih lanjut karena berhubungan dengan kebijakan yang mengarah pada legitimasi intervensi negara dan investor.

Dominasi Diskursus Pembangunan dalam Narasi Tata Kelola SDA

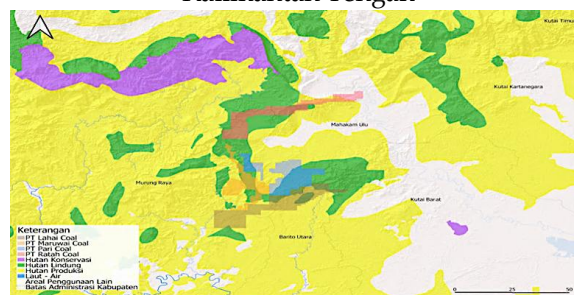
Penelitian ini menggunakan Teori Diskursus Politik yang mencetuskan adanya kebijakan publik yang sifatnya tidak teknokratis, akan tetapi dibentuk dengan adanya narasi serta munculnya praktik diskursif yang memperlihatkan relasi kuasa (Faisal, 2024). Dalam konteks tata kelola sumber daya (SDA) melalui pendekatan yang dinilai relevan untuk melihat bagaimana diskursus pembangunan yang didominasi oleh wacana kebijakan, serta narasi alternatif seperti adanya keadilan ekologi serta melibatkan partisipasi lokal serta komunitas (Fischer, 2003). Kebijakan publik yang terlihat netral secara teknis pada dasarnya merupakan hasil konstruksi narasi yang dibangun oleh pemerintah serta korporasi yang sering mengabaikan perspektif sosial-ekologis.

Hasil penelitian berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mahakam Ulu tahun 2022–2024 menunjukkan adanya narasi pembangunan yang diekspresikan melalui frasa seperti “optimalisasi pemanfaatan ruang strategis serta peningkatan investasi”. Hal ini menunjukkan adanya pembangunan yang diposisikan sebagai tujuan utama yang mempertimbangkan aspek sosial-ekologis masyarakat lokal.

Dalam perspektif Fischer, bahasa kebijakan semacam ini bukan istilah netral, tetapi bagian dari strategi diskursif yang membingkai pembangunan ekonomi sebagai

Setiap sektor pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan konektivitas, menarik investasi, dan memanfaatkan potensi lokal. Namun, kebijakan tersebut juga berdampak besar terhadap sumber daya alam, misalnya pembukaan hutan skala besar, eksplorasi energi, dan tambang yang dapat merusak kawasan hutan serta hutan lindung serta masyarakat lokal (*OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019*, 2019)

Gambar 2 . Peta Konsesi PT Lahai Coal di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah



Sumber: Peta Konsepsi Anak Perusahaan Adaro di Kalteng Dan Kaltim, terlihat tumpang tindih dengan Kawasan Hut, 2023

Gambar 1 di dalam peta menunjukkan adanya konsesi tambang dengan izin usaha yang menunjukkan adanya ekspansi wilayah serta industri ekstraktif yang

bersinggungan dengan kawasan hutan lindung serta wilayah adat. Adanya representasi visual yang memperjelas adanya pembangunan secara sempit dalam meningkatkan kualitas modal serta meningkatkan adanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mampu mempertimbangkan adanya aspek keberlanjutan serta keadilan distribusi (Keong & Onuma, 2021).

Temuan yang menunjukkan adanya aktor-aktor kunci seperti Pemerintah Daerah, DPRD, dan Perusahaan Tambang memiliki peran dominan dalam kebijakan Pembangunan dengan adanya proses perizinan secara top-down, minimnya transparansi, serta pembatasan akses informasi masyarakat sipil. Dukungan teori Dominasi Diskursus Pembangunan oleh Fischer (2003) memberikan pandangan pembangunan wilayah yang tidak netral, melainkan adanya syarat serta relasi kuasa. Diskursus yang digunakan dengan kebijakan pro-investasi yang mengabaikan adanya resistensi lokal. Pemerintah yang bertindak bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai agen hegemonik serta melegitimasi kepentingan korporasi serta mengatasnamakan kepentingan nasional. Gambar ini juga menunjukkan adanya struktur kebijakan serta perizinan yang cenderung top-down dan tidak transparan, yang menyebabkan adanya aktor-aktor masyarakat sipil serta akses yang sulit dalam menggali informasi serta kurangnya partisipasi masyarakat. Adanya dominasi diskursus pembangunan serta narasi kebijakan yang bukan hanya sekadar soal teknokrasi atau pilihan ekonomi, serta bentuk dari gejala konstruksi politik yang berkepentingan serta memproduksi ketimpangan serta kerentanan sosial-ekologis.

Diskursus dalam Dokumen Kebijakan, Perizinan dan Aktor Kepentingan Kabupaten Mahakam Ulu

Rencana ekspansi tambang batu bara oleh PT Adaro Minerals Indonesia (ADMR) melalui anak perusahaannya, PT Lahai Coal dan PT Maruwai Coal, mencerminkan dominasi diskursus pembangunan dalam tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu. Narasi ini dibingkai dalam logika peningkatan produksi dan permintaan pasar batu bara kokas, yang secara retorik dibungkus sebagai kebutuhan “strategis” untuk ekonomi nasional.

Namun, pendekatan diskursus politik sebagaimana dikemukakan oleh Fischer (2003) menekankan bahwa kebijakan publik bukan sekadar hasil teknokratis atau kebutuhan rasional, melainkan merupakan hasil konstruksi naratif yang mengandung relasi kuasa dan hegemoni aktor dominan, seperti korporasi besar dan elit kebijakan.

Melalui adanya kerangka Fischer (2003), kebijakan sendiri memiliki peran dalam fungsi politik karena adanya persoalan mana yang dianggap penting serta solusi apa yang dipandang. Batu bara diposisikan sebagai komoditas vital bagi pertumbuhan ekonomi, sementara dampak ekologis, ancaman terhadap masyarakat adat, serta ketimpangan manfaat cenderung disisihkan dari ruang diskursus. Diperlukan adanya pembangunan yang berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang menormalisasikan ekstraksi sumber daya serta membatasi kemungkinan memunculkan narasi alternatif yang berbasis keberlanjutan serta keadilan ekologis.

Gambar 3. Konsesi Adaro dan Habitat Hutan Lindung



Sumber : Hukum Betahita.com, 2023

Dalam hal ini, narasi dominan yang digaungkan oleh pihak Adaro adalah peningkatan produksi dari 2 menjadi 6 juta ton batu bara, dengan dalih pemenuhan kebutuhan pasar internasional. Padahal, konsesi tambang mereka, seperti yang dimiliki PT Lahai Coal dan PT Maruwai Coal, bertumpang tindih dengan kawasan hutan lindung yang merupakan habitat langka badak Kalimantan (*Dicerorhinus sumatrensis harrisoni*).

"Ada Pari, badak kalimantan, di kawasan hutan lindung tersebut." – Dokumentasi Yayasan Auriga"

Sumber : Betahita, 2023

Narasi lingkungan hidup, keberlanjutan ekologi, dan hak atas ruang hidup komunitas lokal tidak muncul dalam wacana formal maupun retorika publik para aktor korporasi. Ini menunjukkan bagaimana narasi alternatif seperti keadilan ekologis dan perlindungan biodiversitas didepolitisasi, tidak diberi ruang dalam proses pengambilan keputusan. Kerangka dari Environmental Justice Theory menyatakan bahwa kondisi mencerminkan adanya ketidakadilan distribusi manfaat serta beban lingkungan, tetapi pengingkaran terhadap *recognitional justice* menunjukkan adanya identitas, hak, serta eksistensi komunitas lokal serta spesies non-manusia seperti Badaka Kalimantan. Hingga melibatkan aktor negara serta korporasi yang mendominasi narasi pembangunan serta minimnya keterlibatan komunitas lokal serta ekosistem yang tersingkir karena kepentingan ekonomi lokal.

Teori Ecological Democracy memperkuat adanya regulasi antara sistem tata kelola yang seharusnya melibatkan adanya manusia sebagai makhluk rasional, tetapi mengesampingkan adanya entitas ekologis yang tidak bersuara, seperti minimnya ruang untuk spesies langka serta hutan primer (Jackson & Horowitz, 1997). Di samping itu, permasalahan lainnya seperti demokrasi ekologis yang gagal bekerja dalam mengambil Keputusan yang bersifat eksklusif dan tidak deliberatif serta mengabaikan adanya suara-suara alternatif yang selalu membawa isu keberlanjutan serta perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam arena ruang publik.

Marjinalisasi Komunitas Adat dan Reduksi Hak Atas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan komunitas adat Dayak yang tinggi, khususnya sub-suku Bahau, Kenyah, dan Punan. Namun, sejak pemekaran kabupaten ini pada tahun 2013, banyak wilayah adat mulai mengalami reduksi hak kepemilikan atas tanah dan hutan. Proses

ini dipicu oleh dua hal utama: masuknya investasi industri ekstraktif (kayu dan tambang) serta lambatnya pengakuan legal atas wilayah adat oleh negara.

Kasus paling mencolok terjadi di Kampung Long Isun, di mana masyarakat adat Bahau Umaq Suling telah menempati dan mengelola wilayah mereka secara turun-temurun. Namun, sejak tahun 2014, konsesi HPH PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT) masuk ke dalam wilayah seluas lebih dari 13.000 hektare, tanpa konsultasi dan persetujuan warga (Free, Prior, Informed Consent - FPIC). Hal ini menimbulkan konflik horizontal dan vertikal: masyarakat menghadapi intimidasi, beberapa tokoh adat dikriminalisasi, dan akses terhadap tanah untuk kebutuhan hidup dibatasi.

Upaya masyarakat Long Isun untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah dilakukan melalui jalur formal dengan mengajukan dokumen dan peta wilayah adat ke pemerintah daerah, mengacu pada Perda Kabupaten Mahakam Ulu No. 7 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2019 tentang tata cara pengakuan dan perlindungan MHA. Namun hingga kini, status hukum wilayah mereka belum diakui secara nasional, sehingga hak kelola atas hutan dan tanah adat masih tumpang tindih dengan izin-izin perusahaan

Situasi ini mencerminkan marjinalisasi struktural, di mana komunitas adat dipinggirkan dari pengambilan keputusan dan mengalami pengabaian hak konstitusional, meski UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 jelas menjamin hak masyarakat adat atas hutan adat. Temuan ini menunjukkan adanya marjinalisasi yang di hadapkan oleh masyarakat adat Long Isun. Dimana Diskursus Politik

KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa tata kelola sumber daya alam di Mahakam Ulu banyak dipengaruhi oleh konstruksi wacana “pembangunan” yang dijalankan oleh negara, elite lokal, dan perusahaan. Narasi tersebut berfungsi sebagai legitimasi atas perluasan industri ekstraktif, yang pada akhirnya mempersempit ruang hidup

masyarakat adat dan memperkuat ketimpangan kuasa antar aktor. Sementara itu, wacana tandingan berbasis klaim atas tanah adat mulai bermunculan, meskipun kapasitas strukturalnya masih lemah dan sulit menandingi dominasi narasi utama. Dari sisi teoretis, temuan ini menegaskan bahwa *critical discourse analysis* mampu menjelaskan fungsi bahasa dan simbol kebijakan sebagai arena kontestasi kekuasaan, bukan sekadar media penyampaian informasi. Hasil penelitian juga memperkaya perspektif teori koalisi diskursus (Hajer) dengan menunjukkan bagaimana aktor politik maupun ekonomi membangun legitimasi melalui bahasa kebijakan untuk mempertahankan kepentingan mereka. Secara teoritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterhubungan Teori Fischer (2003) yang menekankan adanya aspek kontruksi sosial sehingga menimbulkan kebijakan yang tidak ideal/tidak netral, produk yang berasal dari interpretasi ideologis serta nilai-nilai yang sengaja dibentuk sehingga fenomena yang bisa ditangkap ialah :

1. Lapis Diskursif: Teori ini memperlihatkan adanya elit yang membangun “logika kebenaran” yang membuat industri ekstraktif nampak sebagai acuan majunya suara masyarakat adat dalam bersuara.
2. Lapis Kekuasaan : Teori ini juga memperlihatkan adanya kegagalan dalam masyarakat adat untuk menandingi narasi utama yang bukan hanya argumentasi yang lemah, tetapi juga memiliki posisi akses “Panggung Diskursif” yang setara.

Secara praktis, penting untuk mendorong tata kelola SDA yang lebih adil dan partisipatif, dengan menempatkan pengakuan hak masyarakat adat sebagai fondasi utama. Hal ini menuntut kolaborasi yang seimbang antara pemerintah, komunitas adat, dan organisasi masyarakat sipil agar wacana alternatif dapat tumbuh dan memperoleh daya tawar politik yang lebih kuat. Sebagai arah penelitian lanjutan, disarankan adanya kajian perbandingan antarwilayah yang menghadapi situasi serupa di bawah tekanan ekspansi industri ekstraktif. Selain itu, pendekatan etnografi wacana dapat digunakan untuk menelaah bagaimana komunitas adat merumuskan narasi resistensi mereka sendiri serta bagaimana strategi komunikasi dapat

memperluas pengaruh wacana tandingan dalam perdebatan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas dapat di kemukakan implikasi secara teoritis serta teoritis dan empiris sebagai berikut :

1. Implikasi Empiris

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif dan ekonomi, tetapi juga oleh kuatnya pengaruh dari relasi kekuasaan antaraktor yang menggaungkan wacana pembangunan. Negara, elit lokal, dan perusahaan memiliki posisi dominan dalam menentukan arah kebijakan, sementara itu, masyarakat adat memiliki tantangan berupa keterbatasan akses dalam memperoleh politik, informasi, dan ruang partisipasi. Secara empiris menimbulkan dampak menyempitnya ruang hidup masyarakat adat, meningkatnya potensi konflik agraria serta lemahnya posisi tawar komunitas lokal dalam pengambilan keputusan. Sehingga beresiko memperdalam ketimpangan sosial-ekologis yang tidak di iringi perlindungan hak masyarakat adat.

2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini juga memperkuat adanya keterkaitan Critical Discourse Analysis (CDA) yang mengkaji adanya politik sumber daya alam yang khususnya mengkritik kebijakan pembangunan, narasi resmi yang digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Kebijakan tidak hanya hadir secara netral, tetapi juga diproses melalui tahapan diskursif yang tidak sampai menguntungkan aktor tertentu. Memperlihatkan adanya koalisi aktor negara, elit politik dan korporat yang membentuk satu persepsi pembangunan, investasi serta modernisasi. Di sisi lain, masyarakat adat mulai membangun wacana tandingan yang berbasis hak ulayat, keadilan ekologis berkelanjutan, dan keterbatasan struktural.

3. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi yang berbasis tata kelola sumber daya alam yang bersifat adil, transparan dan partisipatif.

Pemerintah daerah ataupun pusat menempatkan adanya pengakuan atas hak masyarakat adat sebagai konsultasi publik yang bermakna dengan adanya keterbukaan informasi perizinan. Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang seimbang antara pemerintah, komunitas adat, akademisi serta organisasi masyarakat sipil agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga melanjutkan keberlanjutan ekologis.

REKOMENDASI PENELITIAN

1. Kajian Perbandingan Antarwilayah : Disarankan untuk peneliti langkah selanjutnya sebaiknya melakukan studi komparatif antara wilayah yang memiliki kebijakan sendiri, terutama pengakuan adat yang masih kuat, yang berada di Mahakam Ulu, sehingga melihat bagaimana variasi diskursus negara yang memengaruhi resistensi lokal.
2. Pendekatan Etnografi Wacana : Perlu menghadirkan penelitian yang lebih mikro untuk memahami kondisi narasi perlawanan yang dirumuskan pada tingkat akar rumput, bagaimana bahasa lokal dan memori kolektif digunakan sebagai senjata diskursif untuk melawan klaim perusahaan.
3. Model Tata Kelola Kolaboratif : Rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah membentuk "Dewan Konsultasi SDA" yang bersifat independen dan melibatkan akademisi serta tokoh adat. Model ini bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait perizinan lahan industri ekstraktif.

REFERENCES

- Abdullah, A., Fisher, M. R., & Sahide, M. A. K. (2024). Environmental Governance Challenges of Indigenous Forest Recognition: Climate Solution Ideal and Its Uneven Outcomes in Indonesia. *Forest and Society*, 8(2), 402–421. <https://doi.org/10.24259/fs.v8i2.34423>
- Ambarita, R. (2024). *Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Davidson, J. Seth., & Henley, David. (2010). *Adat dalam politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : KITLV-Jakarta.
- Djumaty, B. L., & Dey, N. P. H. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Sungai Batu Terhadap Perubahan Iklim Di Desa Kubu Kabupaten Kotawaringin Barat. *Metta: Jurnal Ilmu* <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta/article/view/2925>
- Enala, S. H., Mana, F. A., Prasetya, M. N., & Adam, A. F. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Lokal di Kabupaten. In *JPI Papsel Jurnal Pengabdian dan Inovasi* (Vol. 02, Issue 01).
- Faisal. (2024). *RELASI KUASA DAN PENGETAHUAN DALAM TEKS I LA GALIGO; SUATU ANALISIS WACANA KRITIS MICHEL FOUCAULT*.
- Firman Hidayat, R. T. B. K. P. A. R. R. P. (2025). *Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan*.
- Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford University Press.
- Jackson, J. Brinckerhoff., & Horowitz, H. Lefkowitz. (1997). *Landscape in sight : looking at America*. Yale University Press.
- Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. In *Energy Research and Social Science* (Vol. 11, pp. 174–182). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004>
- John W. Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fifth Edition*.
- Kaltim Today. 2024. (<https://kaltimtoday.co/pemkab-mahulu-gelar-sosialisasi-dan-pelatihan-program-fcpf-untuk-pelestarian-hutan-dan-penurunan-emisi-karbon>)
- Mahendra, F., & Maria, M. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Penjualan Daging Sapi Segar. *Forum Agribisnis*, 13(1), 24–34. <https://doi.org/10.29244/fagb.13.1.24-34>
- Munfarida, E. (2014). ANALISIS WACANA KRITIS DALAM PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8, 1–19. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>
- Norman Fairclough. (1995). *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language*. Longman Group.
- Nurfatriani, F., Ramawati, Sari, G. K., Saputra, W., & Komarudin, H. (2022). Oil Palm Economic Benefit Distribution to Regions for Environmental Sustainability: Indonesia's Revenue-Sharing Scheme. *Land*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/land11091452>
- Omo Rusdiana, S. Y. A. & C. E. W. (2017). Potensi Pengembangan Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Regional and Rural Development Planning Juni*, 1(2), 114–131.
- Philipus M Hadjon, dkk. (2020). *Buku Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam :Problem dan Tantangan di Indonesia*. Genta Publishing.
- Prasetya, N. H., & Zuffran, F. (n.d.). *Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang*. 2(2), 686. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12636889>

- Putriyanda, D., Sirait, N. N., & Lubis, T. M. (2025). Regulations and Implementation of the Green Economy in the Development of Green SMEs in North Sumatra Province. *Al-Bayyinah*, 9(1), 16–30. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v9i1.8676>
- Rifai, H. (2024). Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*.
- Rodríguez, T., Bonatti, M., Löhr, K., Bravo, A., Del Río, M., Lana, M., & Sieber, S. (2023). Upscaling agroforestry in the tropics through actor-networks: a comparative case study of cacao farming systems in two regions of Colombia. *Sustainability Science*, 18(4), 1631–1648. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01303-6>
- Sabogal, M. (2009). The Will to Improve: Governmentality, Development, and the The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics Practice of Politics. In *Journal of Ecological Anthropology* (Vol. 13, Issue 1). <https://digitalcommons.usf.edu/jea/vol13/iss1/6>
- Sanjaya, A., Ketut Gunawan, I., Arhas, S. H., & Pratama, S. M. (2022). *The Influence of Economic Conditions and Psychological Conditions of the Community on Government Readiness in the Development of the National Capital*. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Setiady, T., Astawa, K., & Iswari, B. (2024). TINJAUAN YURIDIS ATURAN HUKUM SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO) MELALUI POLA KEMITRAAN RANTAI PASOK BAGI PELAKU USAHA. In *Jurnal Tata Kelola Hukum* (Vol. 8, Issue 7).
- Theopilus David, H. D. I. M. N. S. N. E. (2024). *Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal di Kabupaten Mahakam Ulu*.
- Tria Anggita Hafsa. (2024). *Di Balik Konflik Sawit yang Tak Kunjung Usai: Hak, Kuasa, dan Kehidupan Masyarakat Lokal*.
- Utoyo, B. (2017). *Spirit Publik Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota An Analysis on Governance Principle Policy and Actor using Analytical Hierarchy Process (AHP) in City Planning*. 12, 45–56.
- Wiati, C. B., Angi, E. M., Karmilasanti, K., Murniati, M., Suharti, S., Putri, I. A. S. L. P., Hadi, A. P., Furkan, M., Anyeq, B., Tala, K., Carolina, V., Aziz, A., Andiana, R., Limbong, Y., Naibaho, Y., & Mukrimin, M. (2025a). Cacao Agroforestry in Mahakam Ulu: Transformation Strategy from Traditional to Smart Agroforestry System. *Forest and Society*, 9(1), 306–335. <https://doi.org/10.24259/fs.v9i1.35066>
- Wiati, C. B., Angi, E. M., Karmilasanti, K., Murniati, M., Suharti, S., Putri, I. A. S. L. P., Hadi, A. P., Furkan, M., Anyeq, B., Tala, K., Carolina, V., Aziz, A., Andiana, R., Limbong, Y., Naibaho, Y., & Mukrimin, M. (2025b). Cacao Agroforestry in Mahakam Ulu: Transformation Strategy from Traditional to Smart Agroforestry System. *Forest and Society*, 9(1), 306–335. <https://doi.org/10.24259/fs.v9i1.35066>
- Wibisana, K. (2025). Kebijakan publik di Indonesia sebagai alat kepentingan kapitalis. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 5(5).